

Pasar Modern Dan Marginalisasi Sosial: Studi Kasus Ketimpangan Antarruang Di Kawasan Urban

Faizah, Nafrida I.¹, and Windiani²

Departemen Studi Pembangunan, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia
windiani@its.ac.id

ABSTRACT

The rapid development of modern markets in urban environments reflects economic progress and the structural transformation of society. However, behind this modernization lies a growing social gap, particularly between modern consumption spaces and the surrounding local communities. This article aims to examine how the presence of modern markets can create forms of social marginalization for the surrounding community, through a case study of the Pakuwon City Mall area in Surabaya. The research was conducted using a qualitative approach through field observations and interviews with business owners inside the mall, in the area outside the mall, and several shoppers. The findings indicate differences in access to economic resources, increasingly impersonal forms of social relations, and spatial exclusion experienced by local residents due to the expansion of modern markets. Malls have become not only centers of consumption but also symbols of exclusivity and social stratification. Local communities not directly involved in the modern market ecosystem tend to be economically marginalized. This article discusses the need to re-examine modern market-based economic development from a more inclusive and participatory perspective, so as not to neglect the social dimensions and spatial justice in the urban development process.

Keywords: social inequality, marginalization, modern markets, urban space, sociology of development

1. INTRODUCTION/ BACKGROUND

Pembangunan pesat kota-kota besar di Indonesia sejak awal tahun 2000-an telah mendorong meningkatnya persebaran pasar modern, seperti mal, yang menjadi simbol kemajuan ekonomi dan modernisasi urban. Kasus Pakuwon City Mall, menunjukkan bentuk masuknya pembangunan pasar modern ke dalam ruang perkotaan, di mana fungsi ruang tradisional berubah menjadi pusat konsumsi modern. Di satu sisi, pasar modern menawarkan kenyamanan, teknologi, dan peluang pekerjaan. Di sisi lain, muncul pertanyaan kritis tentang siapakah yang benar-benar mendapatkan manfaat? Siapa yang ditinggalkan atau bahkan terpinggirkan oleh tren pasar modern ini?

Di tingkat makro, data menunjukkan bahwa ketimpangan sosial di perkotaan Indonesia masih tinggi. Rasio Gini perkotaan pada Maret 2024 mencapai 0,399, jauh melampaui angka di perdesaan yaitu 0,306. Meskipun angka tersebut menurun dari 0,409 pada Maret 2023, rasio hampir menyentuh ambang "ketimpangan menengah-tinggi" yaitu ($\geq 0,40$) (Andreas Lako 2021). Direktur Bank Dunia bahkan menyebut Indonesia memiliki rasio gini perkotaan tertinggi dibanding negara sekelas seperti Malaysia, Thailand, dan India. Kondisi ini menandakan bahwa perkembangan infrastruktur kota termasuk pasar modern tidak selalu menghasilkan hal positif atau keadilan sosial.

Dalam sosiologi pembangunan, kondisi ini mencerminkan kesenjangan antarruang, yaitu adanya perbedaan akses sumber daya, pelayanan, ruang sosial, dan peluang ekonomi antara ruang

modern (pasar) dan ruang tradisional (perkampungan). Prasasty (2021) menyebut bahwa transformasi ruang perkotaan sering menciptakan “zonasi eksklusif”, di mana komunitas lokal memiliki keterbatasan akses fisik maupun sosial ke kawasan modern. Artikel ini bertujuan membahas lebih dalam bagaimana pasar modern seperti mal berperan dalam memberi gap atau jarak terhadap masyarakat lokal yang tinggal di sekitarnya baik secara struktur ekonomi maupun simbolik.

2. LITERATURE REVIEW

2.1 Teori Modernisasi dan Industrialisasi Ruang Kota

Modernisasi dalam pembangunan kota, yang ditandai dengan proses perubahan sosial, rasionalisasi kehidupan, kemajuan teknologi, dan pertumbuhan sektor formal yang menggantikan sistem ekonomi tradisional. Dalam praktiknya, pasar modern menjadi simbol transformasi struktural dari pola ekonomi komunitas ke arah kapitalisme konsumtif. Clark (2020) menyebutkan bahwa industrialisasi ruang dalam bentuk pasar modern cenderung menghasilkan inovasi yang tidak merata, hanya menguntungkan kelompok yang memiliki akses modal dan teknologi. Hal ini menyebabkan lahirnya ketimpangan antarruang yang bersifat struktural dan berkelanjutan, di mana perkampungan sekitar mall mengalami penurunan nilai sosial dan ekonomi karena tidak kompatibel dengan logika ruang modern.

2.2 Teori Konsumsi dan Simbol Sosial

Konsumsi bukan lagi hanya pemenuhan kebutuhan, melainkan simbol dari kelas sosial dan identitas. Mall atau pasar modern merupakan tempat menunjukkan gaya hidup dan status sosial melalui pemilihan merek, tempat, dan gaya interaksi. Konsumsi menjadi bentuk baru dari eksklusi sosial, di mana mereka yang tidak mampu mengakses hal tersebut secara ekonomi akan terpinggirkan secara sosial. Prasasty (2021) membahas bagaimana pedagang kecil di sekitar pusat perbelanjaan besar menghadapi kesulitan bersaing, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara simbolik mereka dianggap “tidak modern” atau “kurang prestise”.

2.3 Globalisasi, Society 5.0, dan Eksklusi Ruang

Dalam kerangka Society 5.0 yang dipopulerkan oleh Hitachi-UTokyo Laboratory (2022, 2025), pembangunan kota idealnya bersifat inklusif dan Human-sentris. Namun, dalam praktik di banyak kota berkembang, justru kebalikannya. Pembangunan yang difokuskan pada sektor ritel modern dan teknologi justru memperlebar gap sosial apabila tidak disertai kebijakan redistributif. Buku The Rise of Technosocialism (King & Petty, 2021) memperingatkan bahwa ketimpangan teknologi dan ruang dapat menciptakan dua dunia sosial dalam satu kota yang terhubung dan tertinggal. Pasar modern sebagai ruang global sering kali mengadopsi nilai-nilai konsumsi instan, efisiensi digital, dan estetika yang tidak kompatibel dengan kehidupan komunitas lokal yang lebih sosial. Akibatnya, terjadi eksklusitas terhadap masyarakat sekitar, yang tidak hanya kehilangan peluang ekonomi, tetapi juga kehilangan ruang sosialnya sendiri.

2.4 Ketimpangan Sosial dan Marginalisasi Antarruang

Marginalisasi sosial merupakan proses di mana kelompok tertentu tersisih dari akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan bentuk sosial. Dalam konteks urban, hal ini sering terjadi akibat ketimpangan ruang yang berkembang melalui pembangunan fisik dan zonasi eksklusif. Menurut Bourdieu ketimpangan tidak hanya terbentuk oleh distribusi kekayaan ekonomi, tetapi juga oleh akses terhadap pendidikan, gaya hidup, budaya, dan jaringan sosial. Data dari BPS (2024) menunjukkan bahwa rasio Gini di wilayah perkotaan Indonesia mencapai 0,399, menunjukkan

ketimpangan menengah menuju tinggi. Ketimpangan ini bukan hanya tampak dalam distribusi pendapatan, tetapi juga dalam akses ke ruang ekonomi, sebagaimana terlihat di kawasan sekitar pasar modern yang tidak memberikan tempat yang layak bagi pelaku ekonomi lokal (Triono & Tisnanta, 2022).

2.5 Penelitian Terdahulu

Table 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Objek dan Hasil
1	Prasasty, B. H. (2021). Kesenjangan Sosial dan Ekonomi antara Indomaret dan Pedagang Kaki Lima di Kota Samarinda.	Interaksi dan kesenjangan antara ritel modern dengan pedagang kaki lima di Kota Samarinda. Penelitian menemukan bahwa kehadiran ritel modern mempersempit ruang ekonomi bagi pedagang kecil karena dominasi modal, lokasi strategis, dan sistem distribusi modern. Selain itu, adanya perubahan perilaku konsumsi masyarakat turut memungkinkan pelaku usaha informal.
2	Triono, A. & Tisnanta, H. (2022). Pasar Rakyat vs. Pasar Modern: Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah.	Analisis kebijakan daerah terhadap pasar rakyat dan pasar modern di berbagai kota di Indonesia. Studi ini menunjukkan adanya diskriminasi regulasi, di mana pasar modern lebih dilindungi dan difasilitasi melalui kebijakan yang pro-korporat. Sementara itu, pasar rakyat pembatasan, menghadapi menunjukkan banyak bentuk marginalisasi struktural dari negara terhadap sektor informal.
3	Wiman R. Rizkidarajat et al. (2024). Gentrifikasi dan Ketimpangan Sosial di Kelurahan Pabuwaran, Banyumas.	Fenomena gentrifikasi dan dampaknya terhadap warga lokal di sekitar proyek pembangunan kawasan baru di Pabuwaran. Penelitian menemukan bahwa gentrifikasi menciptakan ketimpangan spasial dan sosial. Warga lama terdesak secara ekonomi, kehilangan akses lahan dan ruang hidup. Kenaikan nilai properti dan perubahan orientasi ruang menyebabkan perpindahan paksa secara tidak langsung.

2. METHODOLOGY

Artikel ini disusun dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan observasi sosial terbatas. Tujuan utama penulisan adalah untuk menganalisis relasi antara pasar modern dengan marginalisasi sosial yang terjadi di ruang sekitar, khususnya di kawasan Pakuwon City Mall. Penulisan menggunakan kombinasi metode eksploratif-literatur dan pemetaan fenomena sosiologis berdasarkan sumber primer dan sekunder.

Penulis menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif deskriptif dengan mengangkat realitas sosial di sekitar Pakuwon City Mall (PCM), Surabaya, sebagai representasi dari pasar modern yang berkembang di kawasan urban. Meskipun artikel ini tidak didasarkan pada survei dalam jumlah besar, namun wawancara dan observasi lapangan ringan dilakukan untuk menggambarkan praktik interaksi sosial, struktur ruang, dan posisi masyarakat dan pelaku usaha

informal di sekitar mall. Observasi ini dilengkapi dengan kajian pustaka dari jurnal akademik open access dan buku buku teoritis terkini untuk memperkuat analisis.

Beberapa jurnal ilmiah nasional yang dijadikan rujukan antara lain:

- Triono & Tisnanta (2022), yang menunjukkan adanya bias regulasi terhadap pasar tradisional akibat ekspansi pasar modern.
- Prasasty (2021), yang menyoroti kesenjangan antara minimarket dan pedagang kaki lima sebagai bentuk ketimpangan relasional dan ekonomi.
- Rizkidarajat et al. (2024), yang menyoroti gentrifikasi kawasan urban sebagai bagian dari marginalisasi simbolik dan spasial.

Untuk kerangka teoritik dan konseptual, digunakan literatur terbaru seperti:

- Jennifer Clark (2020) dalam bukunya Uneven Innovation, yang menelaah ketimpangan dalam ruang kota modern akibat industri berbasis teknologi dan retail.
- Hitachi-UTokyo Laboratory (2022 & 2025) yang mengembangkan konsep Society 5.0 dan pendekatan people-centric smart city, menjadi acuan untuk mengkritisi eksklusi Masyarakat sekitar dari pembangunan berbasis pasar.

Data sekunder seperti rasio Gini perkotaan Indonesia sebesar 0,399 pada Maret 2024 digunakan sebagai indikator makro ketimpangan sosial nasional (BPS, 2024). Data ini menjadi bukti bahwa urbanisasi dan pembangunan fisik yang masif tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan keadilan sosial.

Dengan pendekatan ini, artikel bertujuan tidak hanya mendeskripsikan ketimpangan sosial di sekitar pasar modern, tetapi juga menawarkan bacaan sosiologi terhadap bagaimana ruang ekonomi modern bisa menciptakan marginalisasi yang dilembagakan melalui sistem dan simbol.

3. RESULT AND DISCUSSION

Observasi di PCM menunjukkan bahwa mall tumbuh sebagai pusat aktivitas ekonomi berkelas. Tenant resmi dan franchise mengisi ruang utama mall dengan sistem ritel berstandar tinggi, didukung teknologi digital, dan pelayanan profesional. Sebaliknya, pelaku informal seperti pedagang bazar UMKM hanya menempati zona terbatas atau area temporer saat diadakan event dengan batasan waktu yang relative singkat, hal ini mencerminkan ketimpangan ruang dan akses. Hasil observasi ini selaras dengan Prasasty (2021), yang menggambarkan bagaimana mini-market modern menekan ruang ekonomi pedagang informal karena kalah bersaing modal dan konsumen. Keadaan ini mengindikasikan bahwa pasar modern memproduksi ruang yang terstruktur dan eksklusif, mendukung teori gentrifikasi ruang dari Rizkidarajat et al. (2024) yang mengungkapkan bagaimana perubahan orientasi ruang menyebabkan marginalisasi sosial dan ekonomi. Tenant formal mendapatkan keuntungan dari orientasi modal tinggi, sedangkan kelompok informal hanya mendapat kesempatan dan peluang lebih sedikit.

Interaksi di PCM tidak sebatas transaksi ekonomi, tetapi memperlihatkan gaya hidup, simbol kemewahan dan identitas dalam gaya konsumsi. Observasi menunjukkan bahwa konsumen lebih memilih layanan berkelas, fasilitas nyaman, dan brand premium, sebagai cara untuk mengekspresikan status sosial mereka. Ruang mall menjadi tempat di mana simbol kemapanan dan identitas terlihat melalui brand dan apa yang mereka gunakan. Konsumen dengan dana terbatas cenderung tidak nyaman, dan memiliki keterbatasan ketika harus membelanjakan uangnya di tempat eksklusif dengan harga relatif tinggi. Ketimpangan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial. Konsumerisme mall menguatkan simbol status baru di ruang urban, sementara kelompok yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan modus sosial mall menjadi pihak yang tertinggal dan membangun pola hidupnya sendiri secara sosial.

Tinjauan pustaka tentang regulasi menunjukkan adanya bias pro-korporat dalam pengaturan ruang pasar modern (Triono & Tisnanta, 2022). Pemerintah daerah sering memberikan kemudahan perizinan, proteksi hukum, dan insentif bagi pasar modern, sementara pasar rakyat dan usaha informal tidak menerima perlakuan serupa. Observasi lapangan di PCM memperkuat hal ini dimana ruang informal hanya dapat muncul saat event dan tidak memiliki kepastian hukum atau ruang usaha tetap. Struktur tata ruang dan regulasi yang condong pada pasar modern menciptakan ketimpangan struktural yang sistematis, bukan sekadar hasil pilihan pasar bebas. Ini memvalidasi referensi bahwa modernisasi fisik bisa memmarginalkan kelompok lemah jika tanpa redistribusi ruang secara adil.

Hasil observasi mengindikasikan bahwa masyarakat lokal tidak hanya kehilangan peluang ekonomi, tetapi juga ruang sosial untuk berinteraksi dan dibayangkan sebagai bagian dari ruang kota modern. Mall hadir dengan nilai-nilai baru yakni efisiensi, kecepatan, kenyamanan, dan kemewahan namun sangat berbeda dengan kondisi di pemukiman sekitar mall. Kehidupan di pemukiman sekitar mall memang lebih sempit dan tidak senyaman kluster mall, namun mereka memiliki kehidupan sosial yang lebih tinggi dengan penerimaan keadaan yang lebih besar. Hal ini terlihat dari adanya community-run spaces seperti warung dan gotong-royong di lorong kampung yang tidak lagi bisa ditemukan dalam ruang privat mall. Kondisi ini memperkuat teori Clark (2020) tentang “uneven innovation” di mana ruang kota yang cerdas dan modern malah memperlebar kesenjangan. Mall sebagai simbol front modernisasi malah menjadi ruang yang terpisah dari komunitas sekitarnya, menimbulkan marginalisasi makna dan ruang bagi warga lokal.

Pakuwon City Mall secara geografis dan simbolik menciptakan ruang kota yang terstruktur untuk kelompok bermodal dan terdidik, tetapi mengesampingkan pelaku informal dan komunitas lokal. Hal ini menegaskan bahwa modernisasi fisik melalui pasar modern menimbulkan ketimpangan ruang dan sosial meski aktivitas konsumsi meningkat. Artikel ini menekankan bahwa pembangunan ruang kota harus diiringi langkah redistributif ruang sosial, agar masyarakat lokal tidak mengalami marginalisasi akibat modernisasi yang tidak merata.

4. CONCLUSION

Pembangunan pasar modern seperti Pakuwon City Mall merupakan cerminan nyata dari proses modernisasi dan industrialisasi ruang kota yang mengedepankan efisiensi, teknologi, dan konsumsi. Namun, keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari realitas ketimpangan sosial yang muncul sebagai dampak dari ketidakseimbangan dalam akses, penguasaan ruang, dan representasi sosial antara pelaku ekonomi formal dan informal. Dalam konteks sosial-spasial, pasar modern seperti PCM mendorong terjadinya marginalisasi antarruang, di mana komunitas lokal yang tinggal di sekitar mall mengalami pengikisan peluang ekonomi dan dislokasi simbolik akibat orientasi pembangunan yang lebih pro-korporasi. Konsumsi di mall tidak hanya soal membeli barang, tetapi juga mempertontonkan status sosial. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan Society 5.0 pasar modern seharusnya tidak hanya melayani kebutuhan konsumsi kelas menengah-atas, tetapi juga menjadi ruang publik inklusif yang memberi tempat bagi pelaku usaha kecil, warga lokal, dan komunitas sekitar. Tanpa perubahan arah pembangunan yang lebih adil dan partisipatif, pasar modern akan terus menjadi simbol kemajuan fisik yang menutupi ketimpangan sosial yang membesar di bawahnya.

REFERENCES

- Aaltonen and Kurvinen, Contemporary Issues in Industry 5.0: Towards an AI-Integrated Society (2025).
- A. W. Wardah, N. Hayat, and S. Afrizal, Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasca Revitalisasi Pasar Induk Cibitung. (Jurnal), Jurnal Pendidikan Tambusai (2022).
- B. H. Prasasty, Kesenjangan Sosial dan Ekonomi antara Indomaret dan Pedagang Kaki Lima di Kota Samarinda. (Jurnal). Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora (2021) 62–69.
- Hitachi, Society 5.0: A People-centric Super-smart Society, (2022).
- Hitachi, "The Architecture of "Society 5.0": Six Key Factors for a People-Centric and Sustainable Smart City (Book)," (2025)
- Jennifer J. Clark "Uneven Innovation: The Work of Smart Cities" (Book)," (2021)
- K. Brett, and P. Richard "The Rise of Technosocialism: How Inequality, AI and Climate Will Usher in a New World (Book)," (2021)
- L. Andreas, Waspadai Ketimpangan Perkotaan, Jurnal Unika, (2021)
- S. T. Putri, V. I. Pinasti, and D. Jatmiko, Mereka yang Semakin Terpinggirkan: Buruh Gendong Pasar Beringharjo Pasca Pandemi. Dimensi: Jurnal Kajian Sosiologi (2024), 13(2), 167–178.
- Triono, A. and Trisnanta, H., Pasar Rakyat vs. Pasar Modern: Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah, Pancasila: Jurnal Keindonesiaan (2022), 2(1), 12–36.
- Wiman R. Rizkidarajat et al, "Gentrifikasi dan Ketimpangan Sosial di Kelurahan Pabuwaran, Banyumas," Jurnal Ilmu Sosial & Humaniora Indonesia (2024).